

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASI**

(Studi Perkara Nomor : 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ADELIA RAMADHANI I

NPM 1510012111171

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2019

Reg.No. 23/PID/-02/VIII-2019

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK TANPA MEMILIKI IZIN OPERASI
(Studi Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)**

Adelia¹, Fitriati², Yetisma Saini¹

**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta**

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti

E-mail : adelia13197@gmail.com

ABSTRAK

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memiliki Izin Operasi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm Terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) dengan ketentuan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku usaha peyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki Izin Operasi pada Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki Izin Operasi pada Perkara Nomor 317/Pid.Sus/ 2018/PN.Bjm? Jenis penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen dengan analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penerapan pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki Izin Operasi, semua unsur tindak pidana telah dipenuhi oleh terdakwa (2) Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang merupakan unsur penting.

Kata kunci: Penerapan, pidana, Tenaga Listrik, Izin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASI”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Fitriati S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini, S.H M.H., selaku Dosen pembimbing II dan menjabat selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Susi Herawati, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
2. Bapak Zarfinal, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Syafridatati, SH., MH., selaku Dosen Penasehat Pembimbing Akademik dari penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terkhusus nya Emelia Sandra yang sama-sama berjuang dengan saya yang telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Terakhir penulis memberi penghargaan dan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Isrin Ilyas, dan Ibu Lendawati M dan juga Saudara Kandung dari penulis Adik yang kedua Cindy Amara Febris dan adik yang ketiga Ridho Rahmad Aldino yang telah memberikan dukungan dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiinyarabbal'amin.

Padang, July 2019

Penulis

ADELIA RAMADHANI I
NPM. 1510012111171

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	10
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	10
2. Tujuan Pemidanaan.....	13
3. Teori Pemidanaan.....	14
4. Jenis-jenis Pemidanaan.....	16
B. Tinjauan tentang Generator Set (Genset)	
1. Sejarah Generator Set (Genset).....	19
2. Pengertian Generator Set (Genset).....	21
3. Komponen dalam Generator Set (Genset).....	21
4. Manfaat generator Set (Genset).....	22
5. Dampak penggunaan Genset ketika terjadi	

pemadaman arus listrik.....	24
C. Tinjauan tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	
1. Pengertian Penyedia Tenaga Listrik.....	25
2. Syarat-syarat Izin Usaha Tenaga Listrik.....	25
3. Jenis-jenis Izin Usaha Tenaga Listrik.....	28
D. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Tenaga Listrik.....	29
E. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan	
1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis.....	30
2. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non yuridis.....	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Penerapan pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi berdasarkan Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.....	36
B. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana Terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi dalam Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.....	40
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	